

**ANALISIS IMPLEMENTASI SAK- ETAP PASCA PENCABUTAN  
PSAK NO.27 PADA KPRI DI KABUPATEN PURWOREJO**

Oleh ;  
Nur Rohmah  
Supriono

**ABSTRACT**

*Indonesian Accounting Standard for Non-Publicly-Accountable Entities (IAS for SMEs) is a standard report writing for Small and Medium Interprise (SME) but publish general purpose financial statements for external users. IAS for SMEs effective applies force on 1 January 2011 after the issuance of the revocation ED PPSAK 8 FASB Statement No. 27. 2014 is the fourth year of the enactment of IAS for SMEs. So that the researcher intends to analyze the extent to which the implementation of IAS for SMEs after revocation FASB Statement No. 27, especially on KPRI in Purworejo. Not just the studied implementation but the extent to which the government socialization to introduce IAS for SMEs to the cooperative movement.*

*The research method used in the study is a qualitative research method with purposive sampling technique obtained six KPRI as research samples. The technique of collecting data through observation, interviews and document study and tested the validity of the data by testing credibility and transferability.*

*The results of the study by interviewing informants who have been determined and direct observation showed that KPRI in Kabupaten Purworedjo IAS for SMEs not use guidelines. They are still using the old guidelines of FASB Statement No. 27. Problem occurred because of government Purworejo not provide socialization IAS for SMEs whereas the cooperative movement in 2014 was the fourth year IAS for SMEs is effective, it should have a thorough use of IAS for SMEs on small and medium interprise as KPRI.*

**Keywords:** SAK ETAP, KPRI, Financial Accounting

## A. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Perkembangan dan pembangunan ekonomi tahun 2013 tumbuh 5,78 persen. Meski di bawah target, capaian ini tergolong tinggi di tengah usaha mengurangi defisit transaksi berjalan. Namun, pertumbuhan ini belum berkualitas karena tidak ditopang sektor penghasil barang (*tradable*).

Hal ini mengakibatkan minim penyerapan buruh. Sektor penghasil barang terdiri dari sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri manufaktur (Kompas, 6 Februari 2014). Apabila perkembangan perekonomian yang telah dicapai belum mampu menyerap tenaga banyak tenaga kerja maka yang perlu dikembangkan lagi adalah perekonomian berbasis masyarakat yang mudah berkembang dimasyarakat serta lebih menyerap banyak pengangguran tanpa memerlukan modal yang besar. Perekonomian berbasis masyarakat yang perlu dikembangkan adalah Usaha Kecil Menengah. Dan salah satu usaha yang bisa menjadi soko guru perekonomian nasional adalah koperasi.

Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Pasal 1 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Sedangkan menurut Subandi (2009:19) koperasi adalah suatu kumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas yang bertujuan untuk kesejahteraan ekonomi anggotanya. dengan adanya koperasi yang bertujuan mensejahterakan anggotanya, maka diharapkan perekonomian Indonesia juga mengalami perkembangan.

Masalah utama yang menjadi fokus dari perkembangan koperasi adalah mengenai pengelolaan keuangan. Kebanyakan koperasi kurang memperhatikan pengelolaan keuangan bahkan mereka menganggap catatan keuangan kurang penting dalam suatu usaha. Akibat dari anggapan tersebut maka sebagian koperasi yang ada di Kabupaten Purworejo belum tertib pengelolaan keuangan. Padahal laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja suatu usaha. Meskipun pada dasarnya setiap koperasi ingin untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar baku yang telah ditetapkan. Para pelaksana koperasi beranggapan bahwa membuat laporan keuangan yang sesuai standar merupakan suatu kesulitan.

Dalam penelitian yang dilakukan di wilayah Sidoarjo oleh Iim Ma`rifatul Auliyah (2012) menunjukkan bahwa pengusaha di daerah tersebut belum memahami fungsi dan cara untuk menyiapkan informasi dengan baik, kebanyakan masih menggunakan akuntansi sederhana. Padahal dalam laporan keuangan dapat menjadi tolak ukur bagi pelaksana koperasi untuk memperhitungkan keuntungan yang diperoleh, mengetahui berapa

tambahan modal yang dicapai, dan juga dapat mengetahui keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dimiliki. Jika laporan keuangan yang dibuat tidak mencerminkan hal tersebut, dikhawatirkan pelaksana koperasi melakukan kesalahan saat mengambil sebuah kebijaksanaan. Hal tersebut bukan berarti laporan keuangan harus rumit, boleh sederhana namun juga harus memenuhi unsur *reabilitas*, *realtime* dan *akuntable* (Narsa et.all:2012).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan: dan
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Dalam SAK ETAP (IAI, 2009:166) SAK ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 januari 2011. Penerapan dini diperkenankan. Jika SAK ETAP diterapkan dini, maka entitas harus menerapkan SAK ETAP untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 januari 2010.

Dalam penelitian terdahulu sudah ada yang meneliti mengenai implementasi SAK ETAP pasca pencabutan PSAK No. 27. Seperti yang dilakukan oleh Iim Ma`rifatul Auliyah (2012) di Sidoarjo menyimpulkan bahwa pada pengusaha kampung batik Sidoarjo telah menerapkan akuntansi sederhana dalam kegiatan usahanya. Namun laporan keuangan yang mereka buat belum sesuai dengan SAK ETAP.

Penelitian mengenai penerapan SAK ETAP juga dilakukan di daerah Dumai sebuah kota di Provinsi Riau oleh Raflesia Nurdita (2013) menyimpulkan bahwa secara garis besar pengurus koperasi yang ada di Kota Dumai telah menerapkan akuntansi sederhana dalam pelaporan pertanggungjawabannya. Namun laporan keuangan yang mereka buat baik format maupun bentuknya belum sesuai dengan SAK ETAP.

Memasuki tahun keempat sejak berlakunya SAK ETAP diharapkan pelaksana koperasi sebagian besar sudah menggunakan standar SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan. Akan tetapi, menurut keterangan pegawai Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata (Diskoperindagpar) Kabupaten Purworejo saat peneliti datang pertama kali pada tanggal 12 Maret

2014 menjelaskan bahwa SAK ETAP merupakan sesuatu yang baru dan belum banyak koperasi yang menggunakan SAK ETAP sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan tahunan. Meskipun sudah ada beberapa yang sudah mengikuti pelatihan di provinsi. Bahkan pegawai diskoperindagpar juga mengatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh koperasi kemungkinan ada perbedaan antara data yang ada di komputer dengan data yang dilaporkan ke Diskoperindagpar Kabupaten Purworejo. Hal tersebut

yang membuat peneliti semakin tertarik untuk melakukan penelitian.

Purworejo merupakan kabupaten yang terdiri dari 16 kecamatan. Jenis koperasi yang ada di Kabupaten Purworejo sebanyak 24 jenis. Volume usaha dari 24 jenis koperasi mencapai Rp. 304.740593.222,- dengan nilai tertinggi yaitu Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yaitu Rp. 103.416.071.634. Jumlah KPRI yang ada di Kabupaten Purworejo ada 57 KPRI, peneliti mengambil sampel sebanyak enam KPRI yaitu KPRI Kompak, KPRI Sabar, KPRI KPPDK dan HAM Rutan Purworejo, KPRI Kebak, KPRI Mekkar, dan KPRI Giat (Data Diskoperindagpar:2013). Berdasarkan data di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang sejauh manakah implementasi SAK ETAP pasca pencabutan PSAK No. 27 pada KPRI di Purworejo

## **B. KAJIAN TEORI**

### **B.1 Pengertian Koperasi**

Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Pasal 1 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Menurut Mutis (2004:7), Koperasi merupakan badan usaha yang melindungi kepentingan kaum miskin dan lemah. Menurut Arifin dalam buku Subandi (2009:2) koperasi merupakan badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi anggota dengan dasar prinsip koperasi.

### **B.2 Prinsip Koperasi**

Sebagaimana tercantum dalam bab III pasal 5 UU No. 25 tahun 1992 bagian kedua tentang prinsip koperasi

1. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:
  - a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka
  - b. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis
  - c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besar usaha masing-masing anggota
  - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
  - e. Kemandirian
2. Dalam pengembangan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip sebagai berikut:
  - a. Pendidikan perkoperasian
  - b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis
  - c. Kerja sama antar koperasi.

### **B.3 Fungsi Koperasi**

Menurut Subandi (2009:30) pada dasarnya koperasi memiliki dua fungsi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yaitu fungsi bidang ekonomi dan fungsi bidang sosial :

1. Fungsi dalam bidang ekonomi meliputi
  - a. Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan
  - b. Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil
  - c. Memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi permodalan lainnya
  - d. Menawarkan barang-barang dan jasa dengan harga yang lebih murah
  - e. Meningkatkan penghasilan anggota
  - f. Menyederhanakan dan mengefisienkan tata niaga
  - g. Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan
  - h. Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran
  - i. Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatnya sendiri
2. Fungsi dalam bidang sosial
  - a. Mendidik para anggota untuk memiliki semangat bekerja sama
  - b. Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat berkorban
  - c. Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokrasi
  - d. Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai.

### **B.4 SAK-ETAP**

Dalam IAI (2009:1) Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga peneringkat kredit.

### **B.5 Laporan Keuangan**

Menurut Fahmi (2011:2) laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai prestasi yang dicapai perusahaan pada saat lampau, sekarang dan rencana pada waktu yang akan datang (Pongoh, 2013:671).

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan (Baridwan, 2010:2).

## C. METODE PENELITIAN

### C.1 Jenis Data

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Penelitian kualitatif suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendiskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan diperoleh dari situasi yang alamiah (Satori dan Komariah, 2011:25). Jenis data yang diungkapkan dalam penelitian bersifat narasi, uraian dan juga penjelasan dari informan baik lisan maupun data yang tertulis, serta perilaku dari subjek penelitian yang dikumpulkan selama melaksanakan penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan sampel adalah :

No	Nama	Total Aset	Jumlah Anggota
1.	KPRI Kompak	Rp. 6.005.000.000	6 5
2.	KPRI Sabar	Rp. 3.619.000.000	6 5
3.	KPRI Kebak	Rp. 2.510.000.000	3 5
4.	KPRI Giat	Rp. 2.986.000.000	3 7
5.	KPRI KPPDK dan HAM	Rp. 684.000.000	6 7
6.	KPRI Mekkar	Rp. 650.000.000	6 6

### C.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini data diperoleh dari data primer berasal dari unsur manusia sebagai instrumen kunci yaitu peneliti yang terlibat langsung dalam observasi partisipasi, unsur informan terdiri dari Kepala Dinas Koperasi Perindustrian perdagangan dan Pariwisata (Diskoperindagpar), Ketua KPRI, dan Bendahara KPRI.

### C.3 Teknik Mendapatkan *Sample*

*Purposive Sampling* merupakan teknik penentuan sample dengan menentukan subjek/ objek sesuai dengan tujuan. *Purposive sampling* juga dapat diartikan sebagai

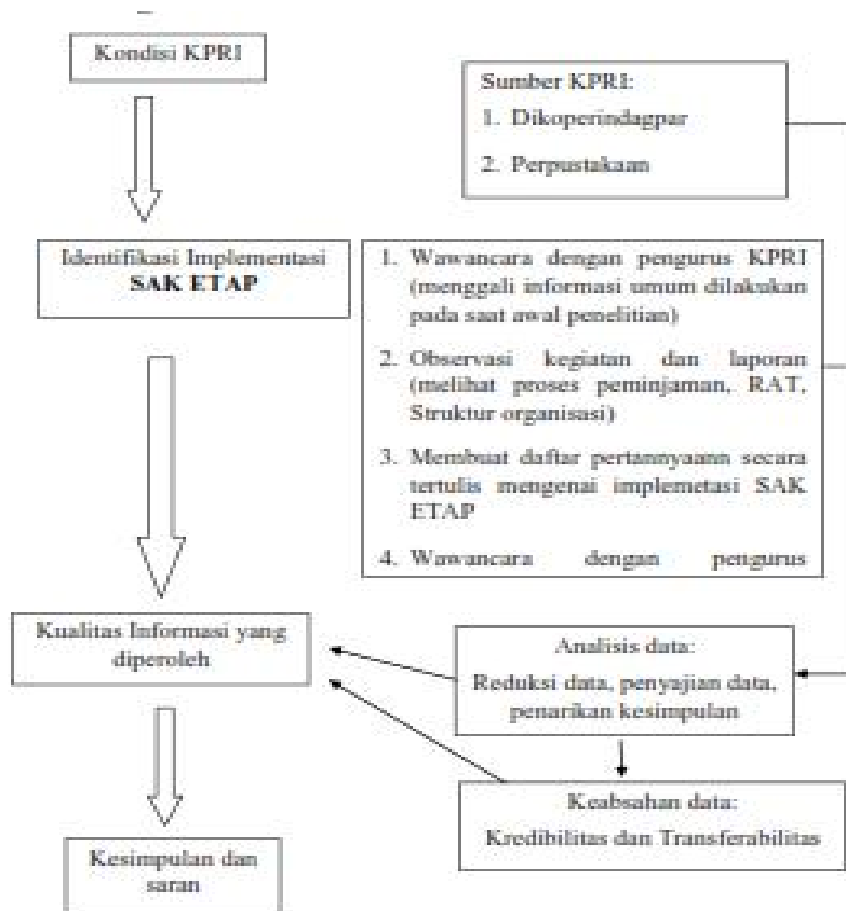
*sampling* yang menentukan target kelompok tertentu. Ketika populasi yang diinginkan untuk peneliti jumlahnya terbatas ataupun waktu yang ada tidak memungkinkan peneliti untuk meneliti semua bagian populasi, *purposive sampling* mungkin adalah satu-satunya pilihan.

Dalam penelitian ini kriteria yang memenuhi *purposive sampling* adalah: KPRI dengan jumlah modal yang besar di atas 1 Milyar Rupiah dan jumlah anggota di atas angka 100 anggota dan peneliti juga membuat perbandingan pada KPRI dengan jumlah modal yang kecil di bawah 1 Milyar Rupiah dan jumlah anggota di bawah angka 100 anggota dan terdaftar di Diskoperindagpar Kabupaten Purworejo

#### **C.4 Teknik Analisa Data**

Menurut Moloeng (2004:280) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan megurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam menganalisis data peneliti akan mengelompokkan data yang diperoleh dari kegiatan di lapangan baik itu observasi maupun wawancara kemudian di urutkan menjadi suatu laporan.

#### **C.5 Kerangka Penelitian**



### C.6 Keabsahan Data

#### 1. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Menurut Satori & Komariah (2011:162) Suatu penelitian harus mengandung nilai terpercaya dan peneliti harus mampu mempertanggungjawabkan penelitiannya dan meyakinkan kepada khalayak bahwa kebenaran hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan. Untuk dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian yang dilakukan harus dinyatakan absah. Penelitian kualitatif dinyatakan absah apabila memiliki keterpercayaan (*credibility/ validitas internal*) penelitian.

#### 2. Keteralihan (*transferability/ validitas eksternal*)

Keteralihan berkenaan dengan hasil penelitian, hingga manakah hasil penelitian ini diaplikasikan atau digunakan dalam situasi lain (Satori & Komariah, 2011:173). Usaha membangun keteralihan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara uraian rinci (*thick description*) (Moloeng, 2004:337).

## D. PEMBAHASAN



## D.1 Data Informan

Tabel.1 Data Informan

No	Nama Koperasi	Nama Informan	Jabatan
1	KPRI Kompak	Fitria Danarti	Karyawan
2	KPRI Sabar	Mistinah, SIP	Bendahara
3	KPRI Kebak	Sumardi	Bendahara
4	KPRI Giat	Sulistyo, S.Sos	Bendahara
5	KPRI KPPDK dan HAM Rutan Purworejo	Sulastri	Bendahara
6	KPRI Mekkar	Prasetyawati Tyas Purawani	Penanggung jawab USP

Tabel 2 Data Informan

No	Nama Koperasi	Nama Informan	Jabatan
1	KPRI Kompak	Wiyonoroto, SE, MPd	Ketua
2	KPRI Sabar	Drg Dwitiya S, M. Kes	Ketua
3	KPRI Kebak	Muji Hartono	Ketua
4	KPRI Giat	Waris, S.Pd	Ketua
5	KPRI KPPDK dan HAM Rutan Purworejo	Teguh Budiyo	Ketua
6	KPRI Mekkar	Dwi Sulistiawan, SE	Ketua

## D.2 Deskripsi Penerapan Standar laporan Keuangan Koperasi di KPRI Kabupaten Purworejo

### D.2.1 Penyusunan Laporan Keuangan

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap sumber data menunjukkan bahwa penyusun laporan keuangan adalah bendahara. Tabel berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan.

Tabel 3 Hasil Wawancara

No	Nama Koperasi	Petugas Pembuat Laporan	
		Bendahara/ Karyawan	Ketua
1	KPRI Kompak	Bendahara dibantu oleh	Bendahara
2	KPRI Sabar	Bendahara I bendahara II	Bendahara I dibantu bendahara II Ibu Murni
3	KPRI Kebak	Bendahara	Bendahara
4	KPRI Giat	Bendahara I	Bendahara
5	KPRI KPPDK	Bendahara koperasi	Bendahara
6	KPRI Mekkar	Bendahara dan maing-	Masing-masing unit

Sumber data primer diolah : 2013

### D.2.2 Periode Penyusunan Laporan Keuangan

KPRI di Kabupaten Purworejo, berdasarkan informasi yang diperoleh dari pejabat Diskoperindagpar Kabupaten Purworejo seluruhnya menyusun laporan keuangan yang disampaikan tiap tiga bulan sekali (triwulan) dan laporan tersebut bersifat wajib akan tetapi ada beberapa koperasi yang menyampaikan laporan keuangan setiap bulannya. Hal ini terungkap dari hasil wawancara pada pejabat Diskoperindagpar sebagai berikut: *“Untuk semua koperasi di Kabupaten Purworejo diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan setiap triwulanan dan laporan tersebut sifatnya diwajibkan oleh Dinas Koperasi, akan tetapi ada beberapa koperasi yang sudah melaporkan setiap bulannya karena mereka mempunyai staff khusus yang mengurus penyusunan laporan keuangan dan kami senang dengan hal tersebut.”*

Tabel berikut ini menunjukkan tabel penyusunan laporan keuangan yang dihimpun dari sumber data hasil penelitian

Tabel 4. Hasil Wawancara

No	Nama Koperasi	Periode Pembuatan Laporan Keuangan	
		Bendahara/ Karyawan	Ketua
1	KPRI Kompak	Bulanan	Bulanan
2	KPRI Sabar	Bulanan	Bulanan
3	KPRI Kebak	Triwulanan	Triwulanan
4	KPRI Giat	Bulanan, triwulanan, tahunan	Bulanan, triwulanan, tahunan
5	KPRI KPPDK dan HAM	Bulanan	Bulanan
6	KPRI Mekkar	Triwulanan	Triwulanan

Sumber: Hasil wawancara dan dokumen yang telah diolah

### **D.2.3 Audit Laporan Keuangan**

Kesadaran yang dimiliki oleh KPRI yang ada di wilayah Kabupaten Purworejo terkait dengan penggunaan jasa audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit laporan keuangan tergolong rendah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dari enam KPRI yang dijadikan sampel penelitian tidak ada yang menggunakan jasa audit untuk tahun buku 2013. Fakta tersebut terungkap dari dokumen laporan keuangan hasil wawancara dengan ketua KPRI KPPDK dan HAM Rutan Purworejo. Berikut hasil wawancara dengan Ketua KPRI KPPDK dan HAM Rutan Purworejo. ***“Belum pernah menggunakan jasa audit, pertimbangan pada tahun 1996 sudah pernah ditawarkan untuk menggunakan jasa audi akan tetapi koperasi menolak alasannya biaya yang cukup besar dan saat itu dikenalkan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- dan asset yang dimiliki belum mencapai satu milyar rupiah”***

Hal serupa juga diungkapkan oleh bendahara KPRI Sabar

***“Untuk setiap tahun belum menggunakan jasa audit akan tetapi rencana tahun 2014 akan menggunakan jasa audit”***

Pernyataan dari bendahara juga sesuai dengan pernyataan dari Ketua KPRI Sabar

***“Selama kepengurusan ini belum akan tetapi untuk kepengurusan sebelumnya pernah menggunakan jasa audit. Kewajiban koperasi mengadakan audit setiap akhir periode kepengurusan dan untuk tahun 2014 ini karena merupakan akhir periode kepengurusan rencananya kan menggunakan jasa audit”***

Meskipun mereka tidak diaudit oleh auditor independen dalam hal ini adalah akuntan publik, akan tetapi semua pengurus menyatakan bahwa KPRI sudah diaudit oleh badan pengawas yang telah dipilih oleh Rapat Anggota (RA). Tabel di bawah menunjukkan hasil wawancara dengan sumber data terkait dengan audit atas laporan keuangan KPRI.

Tabel 5 Hasil Wawancara

No	Nama Koperasi	Audit Laporan keuangan	
		Bendahara/	Ketua
1	KPRI Kompak	Jasa audit pernah digunakan pada tahun	Pernah dilakukan tahun 2012 sedangkan tahun 2013 belum
2	KPRI Sabar	Belum menggunakan jasa audit akan tetapi rencana tahun 2014 akan menggunakan jasa audit	Selama periode kepengurusan belum pernah menggunakan jasa audit, rencananya tahun 2014 akan menggunakan jasa audit tersebut
3	KPRI Kebak	Belum pernah	Belum Untuk saat ini belum, rencana ada tapi memang kami
4	KPRI Giat	Pernah diaudit	Pernah diaudit tahun 2011 dan untuk tahun 2013 belum karena audit
5	KPRI KPPDK dan HAM Rutan Purworejo	Belum	Belum pernah menggunakan jasa audit, karena biaya terlalu besar dan asset yang dimiliki belum mencapai satu
6	KPRI Mekkar	Badan pengawas	Badan pengawas

Sumber: Hasil wawancara dan dokumen yang telah diolah

## **Kondisi Pelaporan Keuangan KPRI di Kabupaten Purworejo Pasca Pencabutan PSAK No 27**

Pencabutan PSAK No. 27 yang dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam ED PPSAK 8 yang berlaku sejak Oktober 2010 ternyata belum mendapatkan respon yang nyata dari Diskoperindagpar sampai tahun 2014 ini. Tidak hanya pencabutan PSAK No. 27 yang dinilai responnya lambat, akan tetapi temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksana koperasi tidak menggunakan acuan PSAK untuk membuat laporan keuangan. Mereka hanya menggunakan panduan turun temurun yang sudah dijadikan acuan pembuatan laporan keuangan tanpa tahu dasar penyusunan laporan keuangan.

Hasil wawancara dengan informan perihal jenis laporan keuangan koperasi yang disusun mendapatkan jawaban yang beragam. Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui pedoman penyusunan laporan keuangan. Hasil wawancara berikut menunjukkan bahwa pengurus koperasi belum sepenuhnya mengetahui dasar penulisan penyusunan laporan keuangan. Seperti yang diungkapkan oleh karyawan KPRI Kompak. ***“PSAK No. 27 juga belum mengetahui, hanya mengetahui UU No. 17 tahun 2012 akan tetapi penerapannya belum sepenuhnya”***

Tidak hanya karyawan dari KPRI Kompak, hal serupa juga diungkapkan oleh bendahara KPRI Sabar berikut. ***“PSAK No. 27 juga tidak mengetahui”***

Ketua KPRI KPPDK dan HAM Rutan Purworejo juga menyatakan hal yang sama ***“Mengenai dasar pembuatan laporan keuangan sudah selama 27 tahun kita menggunakan folder yang seperti dulu tiap kami laporkan tidak pernah ada permasalahan. Apalah artinya kami kembangkan toh hal seperti itu sudah dipahami dan kami dalam keadaan sehat dan baik. Mungkin dalam teknik kami salah akan tetapi akuntabilitas yang penting. Daripada kami memakai standar apalah malah bingung”***

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua KPRI Sabar

***“laporan keuangan yang dibuat ya necara, SHU hanya perbandingan antara tahun 2012 dan tahun 2013 mengenai penjelasan rinci merupakan rahasia.”***

Tabel di bawah ini menunjukkan jenis laporan keuangan yang disusun oleh KPRI di Kabupaten Purworejo

Tabel 6 hasil wawancara

No	Nama Koperasi	Neraca	PHU	Perubahan Ekuitas	Arus Kas	CALK
1	KPRI Kompak	Ada	Ada	-	-	Ada
2	KPRI Sabar	Ada	Ada	-	-	Ada
3	KPRI Kebak	Ada	Ada	-	-	Ada
4	KPRI Giat	Ada	Ada	Ada	-	Ada
5	KPRI KPPDK dan HAM Rutan Purworejo	Ada	Ada	Ada		Ada
6	KPRI Mekkar	Ada	Ada	-	-	Ada

### Pemahaman KPRI Terhadap SAK-ETAP

Hasil wawancara mengenai penerapan SAK ETAP pada KPRI di Kabupaten Purworejo yang dilakukan oleh pengurus KPRI menemukan bukti bahwa, hanya Ketua KPRI Kompak yang secara faktual memahami SAK ETAP. Hal tersebut dapat dinilai dari kemampuan Ketua KPRI Kompak saat peneliti mengajukan permohonan penelitian. Beliau sudah langsung tanggap tema SAK ETAP yang diajukan oleh peneliti. Saat wawancara Ketua KPRI Kompak menyatakan

*“saya mengetahui SAK ETAP”*

Pengurus lain yang dijadikan sumber data dalam penelitian seluruhnya menyatakan ketidak pahamannya terhadap SAK ETAP. Bahkan untuk karyawan KPRI Kompak sendiri juga belum memahami SAK ETAP. Berikut pernyataan karyawan Karyawan KPRI Kompak

*“Saya Tidak mengetahui SAK ETAP”*

Tabel berikut menunjukkan hasil wawancara mengenai pemahaman SAK ETAP pada penyelenggara KPRI yang dijadikan sumber data.

Tabel 7 hasil wawancara

No	Nama Koperasi	Pemahaman SAK ETAP	
		Bendahara/ Karyawan	Ketua
1	KPRI Kompak	Belum memahami SAK ETAP	Mengetahui SAK ETAP
2	KPRI Sabar	belum paham betul mengenai SAK ETAP	mungkin itu hanya istilahnya saja yang belum familiar
3	KPRI Kebak	Belum mengetahui	Belum mengetahui
4	KPRI Giat	Asing dengan SAK ETAP	Belum mengetahui
5	KPRI KPPDK dan	Belum mengetahui	Belum mengetahui
6	KPRI Mekkar	Belum mengetahui	Belum mengetahui SAK ETAP

Sumber: Hasil wawancara dan dokumen yang telah diolah

## Sosialisasi SAK ETAP

Berkaitan dengan diberlakukannya SAK ETAP untuk entitas tanpa akuntabilitas publik belum mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah Kabupaten Purworejo. KPRI yang dijadikan sumber data penelitian menyatakan belum pernah mendapatkan sosialisasi khusus terkait SAK ETAP. Hasil wawancara kepada informan menyatakan kebenaran informasi belum pernah diadakannya sosialisai oleh Diskoperindagpar. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil wawancara dengan informan dari enam KPRI.

Tabel 8 hasil wawancara

No	Nama Koperasi	Sosialisasi SAK ETAP	
		Bendahara/ Karyawan	Ketua
1	KPRI Kompak	Belum pernah ada pelatihan secara khusus mengenai SAK ETAP	Dari pihak Diskoperindagpar belum pernah sosialisasi SAK ETAP
2	KPRI Sabar	Sudah ada sosialisasi akan tetapi baru gambaran umum dari SAK ETAP sehingga belum paham betul mengenai SAK ETAP	secara khusus belum, penatarannya hanya akuntansi untuk pembukuan koperasi
3	KPRI Kebak	Belum pernah diadakan sosialisasi SAK ETAP	Belum ada sosialisasi SAK ETAP
4	KPRI Giat	Pernah diadakan sosialisasi akan tetapi kebetulan bukan bendahara yang mengikuti dan sosialisasi SAK ETAP belum pernah diadakan	Belum ada sosialisasi SAK ETAP
5	KPRI KPPDK dan HAM	Belum	Belum pernah ada sosialisasi SAK ETAP
6	KPRI Mekkar	Belum pernah	Pelatihannya belum pernah diadakan

Sumber: Hasil wawancara dan dokumen yang telah diolah

Hal serupa juga disampaikan oleh pejabat Diskoperindagpar bahwa pelatihan dan *workshop* tentang SAK ETAP baru dilakukan di tingkat provinsi. Koperasi yang sudah

mengikuti kegiatan tersebut ada 60 koperasi untuk dua periode. Untuk periode kedua dari KPRI yang mendapatkan kesempatan untuk pelatihan di tingkat Provinsi adalah KPRI Sindoro, KPRI Riang dan KPRI SMEP. Ketiga KPRI tersebut tidak dijadikan sampel dalam penelitian karena keterangan yang diberikan Kabid Koperasi dan UMKM mengenai pemilihan koperasi yang terpilih untuk mengikuti pelatihan ditingkat provinsi adalah koperasi yang memiliki proaktif tinggi supaya bias dijadikan penular untuk koperasi lain. Berbeda dengan yang disampaikan Kepala Seksi (Kasi) koperasi yang menyatakan bahwa pemilihan KPRI untuk mengikuti pelatihan didasarkan pada koperasi yang memiliki proaktif rendah supaya mereka memiliki kesadaran untuk memperbaiki sistem koperasinya. Hal tersebut dibuktikan dengan terpilihnya KPRI SMEP untuk mengikuti pelatihan, padahal KPRI SMEP diketahui bahwa untuk mencari pengurusnya juga mengalami kesulitan. Hasil wawancara berikut menunjukkan informasi yang diperoleh dari Kabid Koperasi dan UMKM

*“Kami memilih koperasi yang proaktifnya tinggi jadi tidak sia-sia dan diharapkan mereka menjadi penular untuk koperasi lain”*

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Kasi Koperasi

*“Kalau kamu memilih KPRI SMEP untuk dijadikan sampel penelitian kamu akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan data karena pengurusnya juga sulit untuk ditemui akan tetapi jika bersedia untuk melakukan pengamatan terhadap KPRI SMEP kami berterima kasih.”*

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan terhadap enam KPRI yang ada di kabupaten Purworejo tentang implementasi Standar Akuntansi Keuangan entitas Tanpa Akuntan Publik (SAK ETAP) ada beberapa kesimpulan yang bisa dikekukakan dalam laporan ini. Kesimpulan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Implementasi SAK ETAP di wilayah Kabupaten Purworejo belum maksimal bahkan dari enam koperasi yang dijadikan sampel penelitian belum ada yang menerapkan SAK ETAP. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
  - a. Sosialisai SAK ETAP belum dilaksanakan secara serentak oleh dinas terkait dalam hal ini adalah Diskoperindagpar.
  - b. Koperasi yang tidak menggunakan SAK ETAP tidak mendapatkan sanksi yang tegas dari SAK ETAP.
  - c. Pejabat Diskoperindagpar yang menangani koperasi tidak sebanding dengan jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Purworejo
  - d. KPRI merupakan koperasi fungsional dan sebegini besar pengurusnya



kurang menguasai penyusunan laporan keuangan sehingga membutuhkan bimbingan teknis yang lebih intensif.

2. Sosialisasi SAK ETAP belum dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purworejo dalam hal ini adalah Diskoperindagpar. Padahal pedoman tersebut sudah berlaku aktif sejak tahun 2011, sehingga pemerintah Kabupaten Purworejo dinilai lamban dalam menindaklanjuti pedoman tersebut

## Daftar Pustaka

- Auliyah, Iim Ma'rifatul. (2012, Februari). *Penerapan Akuntansi Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntan Publik (SAK ETAP) pada UKM Kampung Batik di Sidoarjo*, Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBANAS Surabaya.
- Baridwan, Zaki. 2010. *Intermediate Accounting*. BPF: Yogyakarta.
- Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata. *Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Kelompok Usaha yang Dikelola*. Purworejo: Diskoperindagpar.
- Dinas Koperasi. *Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 (Undang-undang Perkoperasian)*. Jakarta: Dinkop.
- Fahmi, Irham. 2011. *Analisa Laporan Keuangan*. Alfabeta: Bandung.
- IAI. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntan Publik*. Graha Akuntan: Jakarta.
- IAI. 2010. *ED PPSAK 8 Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan Pencabutan PSAK: Akuntansi Koperasi*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan: Jakarta.
- Kompas. (2014, 6 Februari 2014). *Pertumbuhan Indonesia Tinggi tapi Kurang Berkualitas*.  
[http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/02/06/1009378/Pertumbuhan.Ekonomi.Indonesia.Tinggi.tapi.Kurang.Berkualitas\(25.Maret.2014\)](http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/02/06/1009378/Pertumbuhan.Ekonomi.Indonesia.Tinggi.tapi.Kurang.Berkualitas(25.Maret.2014))
- Moloeng, Lexy J. 2004. *Metodologi penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Remaja Rosda Karya: Bandung.
- Munawir. 2010. *Analisa Laporan Keuangan*. Liberty: Yogyakarta. Mutis, Thoby. *Pengembangan Koperasi*. Gramedia: Jakarta

- Narsa, I made; Widodo, Agus; dan Kurnianto, Sigit. 2012. *Mengungkap Kesiapan UMKM dalam Implementasi SAK ETAP untuk Meningkatkan Akses Modal Perbankan*. Majalah ekonomi. No.3 Desember.
- Nurdita JS., Raflesia. (2013, Oktober). Analisis Penerapan SAK ETAP pada Koperasi yang Ada di Kota Dumai. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. 1,
- Pongoh, Marcel, *Analisa Laporan keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan PT Bumi Resource Tbk*, Vol I No 3 September 2013.
- Rapat Anggota Tahunan. *Laporan Keuangan*. Purworejo. KPRI.
- Ratnatunga, Janek dan Sopanah, Aan. (2013, September). *The Impact of Sidoarjo Mudflow Disaster to Economic, Environmental and Social Financing Impact*. Simposium Nasional Akuntansi XVI. Sesi I/8. 767-788.
- Satori, Jam'an dan Komariah, Aan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Subandi. 2009. *Ekonomi Koperasi Teori dan Praktek*. Alfabeta: Bandung